

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS SOSIAL

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) Tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan di Bidang Sosial.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun-tahun berikutnya.

Praya, 2025

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Lombok Tengah,



H. MASNUN, S.Pd.M.Pd.

NIP.19681231 199302 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- c. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2026.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang(UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perpu);
4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 1 Desember 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
3. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Bidang Sosial.
4. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 7.590.995.409,-** dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar 100% dan capain realisasi keuangan sebesar **Rp. 7.357.471.329,- (96,92%).** yang terdiri dari Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang dibina	86,43%	78,23 %	73,81, %	96,38%	%	73,81 %	96,38%	111,51
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang tersosialisasi UGB/PUB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi UGB/PUB	0	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	30 Lembaga	30 Lembaga	100 %
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	17 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	86,43 %	78,23 %	73,81 %	96,38%	126,91 %	73,81 %	96,38%	111,51%
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30 org	50 org	50 org	100%	50 Orang	50 Orang	200%
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	12 orang	12 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 LKS	20 LKS	29 LKS	29 LKS	100 %	29 LKS	29 LKS	145%
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah pengelola LK3 yang dibina	0	0	0	0	0	0	0	0
					Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan SDM dan LK3 Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	78,12 %	89,34 %	73,69 %	94,25%	126,85%	73,69%	84,07%	107,62%
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan kebutuhan dasarnya	1.250 orang	8.235 orang	920 orang	920 orang	334,76 %	353 orang	9.227 Orang	738%
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	750 Orang	1.050 org	500 org	500 org	100 %	240 Orang	1.830 Orang	244%
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	76 org	100 org	100 org	7,24%	23 Orang	149 Orang	99,33%
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orang	394 Org	130 org	130 org	328,33 %	40 orang	483 Orang	345%
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	149 org	60 org	60 org	298%	50 orang	199 Orang	284,29%
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan dan Rujukan	Jumlah Orang mendapatkan layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	0	0	0	0	0	0	0
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	0,67 %	0,89 %	0,63 %	0,70%	141,27 %	0,67 %	5,03%	750,75%
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dokumen Data dan Pengaduan yang dimiliki	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	0	0
						Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.550 org	2.163 org	1.750 org	3.778	123,60%	1.550 org	3.175 org	204,84%
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	277 orang	100 Org	277 org	277 org	41,20 %	609 orang	979 Orang	353,43%
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	0	0	0	0	0	0	0
1	06	04	2.02	14	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Yang Ditangani	60 kasus	60 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	100 %	41 kasus	160 Kasus	266,67%
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	60 Dokumen	60 dok	60 Dok	60 Dok	100%	41 Dokumen	160 Dok	266,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang ditangani	2,54 %	0,39 %	2,20 %	2,20 %	21.08 %	2,20 %	8,94%	351,97%
						Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	730 orang	544 org	630 org	1.044	102,64%	162 orang	10.186 org	1.395,34%
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin yang difasilitasi data dan yang mendapatkan bantuan sosial	190.000 KPM	127.397 KPM	190.000 KPM	128.250 KPM	67,05%	190.000 KPM	288.351 KPM	151,76%
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dilakukan perbaikan datanya	190.000 KPM	127.397 KPM	190.000 KPM	128.250 KPM	67,05%	190.000 KPM	288.351 KPM	151,76%
						Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	190.000 KPM	127.695 KPM	190.000 KPM	128.250 KPM	67,21%	190.000 KPM	129.084 KPM	67,94%
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan Bansos Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	130.370 KPM (BPNT) dan 92.000 KPM (PKH)	127.281 KPM (BPNT) dan 67,583 KPM (PKH)	130.370 KPM (BPNT) dan 92.000 KPM (PKH)	128.250 KPM (BPNT) & 54.549 KPM	97,63 % dan 79,51 %	130.370 KPM (BPNT) dan 92.000 KPM (PKH)	129.084 KPM (BPNT) dan 63.161 KPM (PKH)	99,01% Dan 68,65%
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	700 orang	15	5	5	100 %	0	15	2,14%
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat(Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	400 orang	916 orang	400 orang	1.879 orang	229 %	400 orang	2.318 orang	579,50%
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap	400 orang	0	400 Orang	1.228 Orang	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		darurat(Pengungsian) dan pasca Bencana kewenangan kabupaten/kota												
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	% Tanaga Yang Memenuhi Standar Kompetensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 KSB	0	0	0	0	0	0	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100 %	40 Orang	40 Orang	100%
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Sarana dan Prasarana TMPNK yang layak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
					Jumlah TMP Daerah yang dikelola	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	100%	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	100 %	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan dan pengamanan	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	100 %	1 TMPNK	1 TMPNK	100 %
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	100 %	1 TMPNK	1 TMPNK	100%
					Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaann pada TMPNK	1 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	100%	1 Makam	1 Makam	100%	
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP OPD	BB	B	B	B	100%	BB	-	-
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	5%	0 %	5%	0%	0 %	5 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	8 Bulan	66,67%				
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan SKPD	13 Dokumen	13 Dok	13 Dok	13 Dok	100 %	13 Dok	8 Dok	61,54%
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	-	-
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas ASN	3 Orang	0	0	0	0	0	0	0
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	55 Paket	31 Paket	31 Paket	177,42 %	89 Paket	147 Peket	459,38%
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor disediakan	30 Paketi	36 Paket	25 Paket	25 Paket	144 %	60 Paket	121 Paket	403,33%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	27,27%	3 laporan	9 laporan	81,82 %
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Validasi Data Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	06	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional	3 Unit	0	0	0	0	0	0	0
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	8 Bulan	66,67%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Internet, Jasa Air dan Jasa Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	8 Laporan	66,67%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	8 Bulan	66,67%
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	20 Unit	20 Unit	100%
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barang Milik Daerah yang diservice	26 Unit	7 Unit	26 Unit	26 Unit	26,92 %	7 Unit	20 Unit	76,92%
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara/direhab	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	2 Unit	200 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Persentase penanganan PPKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 sebesar 94,25 %, Jumlah PPKS yang ditangani pada Tahun 2024 sebanyak 137.985 Orang dari jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 146.399 Orang, sementara untuk Program Penanganan Bencana dengan Indikator berupa Persentase Penanganan Korban Bencana sebesar 100 %. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial baik Tujuan maupun Sasaran sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase PPKS yang Graduasi mandiri	-	-	1.11%	1,18%	1,26%	1,35%	1,11%	1,19%	1,30%	1,35%	1,40%	
2	Persentase PPKS yang ditangani	-	-	80,%	85%	90%	95%	78,13%	89,34%	94,25,%	95%	100%	
3	Persentase Penanganan Korban Bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 sudah tergolong baik, realisasi dari target tersebut mencapai angka 94,25 %, dimana jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 137.985 orang.

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih belum memiliki Panti Rehabilitasi atau Penampungan sendiri / Shelter yang digunakan untuk melayani para PPKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari Panti Sosial dan Rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penanganan masalah sosial di Kabupaten Lombok Tengah, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.
- b. Sudah diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Lombok Tengah maka diharapkan secara anggaran tentunya dapat ditingkatkan dalam rangka penanganan jenis layanan dan mutu layanan yang terdapat dalam SPM Bidang Sosial.
- c. Posisi Kabupaten Lombok Tengah sebagai Penyangga ibukota provinsi sekaligus sebagai salah satu pusat Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan tingkat lalu lintas / arus manusia ke Kabupaten Lombok Tengah cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga perlu adanya sosialisasi terkait Napza , eksploitasi anak dan lainnya sebagai upaya preventif dalam menangani masalah social yang muncul.
- d. Sudah 3 Tahun terakhir ini pemberdayaan pada masyarakat miskin melalui KUBe ataupun UEP belum dapat dilaksanakan mengingat anggaran yang sangat terbatas, padahal kegiatan ini sangat menunjang untuk penambahan pendapatan masyarakat miskin.
- e. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.

- f. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih kekurangan Fungsional Penyuluh Sosial serta sarana dan prasarana sangat terbatas terutama kendaraan operasional untuk kegiatan pada bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial.
- g. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
- h. Penanganan PPKS khususnya Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas selama ini masih belum optimal terutama keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah lainnya (Cross Cutting) bila dikaitkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupten Lombok.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, dimana apabila Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Lombok Tengah tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Lombok Tengah terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dukungan dari para *stakeholders* (OPD, dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.

d. Trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kabupaten Lombok Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PPKS penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak.

Penanggulangan PPKS tersebut perlu ditindaklanjuti secara komprehensif dan koordinatif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Lombok Tengah perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir semua kalangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sudah diakomodir. Untuk kondisi Anggaran Tahun 2026 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada dan ke depannya diharapkan adanya peningkatan anggaran yang memadai. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	DINAS SOSIAL				7.018.635.699					7.339.556.099	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kab. Loteng	Nilai Sakip OPD	BB	3.517.496.262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kab. Loteng	Nilai Sakip OPD	BB	3.517.496.262	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	80.759.996	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	80.759.996	
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	34.621.946	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	34.621.946	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.234.898	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.234.898	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.764.046	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.764.046	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.843	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.843	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.843	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.843	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	9.402.505	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	9.402.505	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.697.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.697.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Kab. Loteng	Jumlah Berita Acara Hasi Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan PD	1 Berita Acara	11.039.915	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Kab. Loteng	Jumlah Berita Acara Hasi Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan PD	1 Berita Acara	11.039.915	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	100 %	2.668.914.617	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	100 %	2.668.914.617	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.649.714.759	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.649.714.759	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.999.990	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.999.990	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun SKPD	12 Laporan	14.199.868	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun SKPD	12 Laporan	14.199.868	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	102.900.712	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Loteng	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	102.900.712	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Loteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	50.238.179	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Loteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	50.238.179	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Loteng	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	14.965.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Loteng	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	14.965.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	28.806.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	28.806.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.891.533	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.891.533	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Loteng	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	384.408.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Loteng	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	384.408.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	1 Unit	384.408.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	1 Unit	384.408.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Loteng	Layanan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	12 Bulan	143.669.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Loteng	Layanan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	12 Bulan	143.669.160	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Loteng	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	102.155.260	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Loteng	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	102.155.260	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Loteng	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	86.544.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Loteng	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	86.544.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Loteng	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	90 %	136.843.777	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Loteng	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	90 %	136.843.777	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Loteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	102.155.260	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Loteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	102.155.260	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Loteng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	4.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Loteng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	4.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Loteng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	29.938.517	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Loteng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	29.938.517	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Loteng	Persentase PSKS yang dibina	86,43 %	847.677.748	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Loteng	Persentase PSKS yang dibina	86,43 %	847.677.748	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase Lembaga yang tersosialisasi UGB?PUB	100%	5.994.015	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase Lembaga yang tersosialisasi UGB?PUB	100%	5.994.015	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	5.994.015	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	5.994.015	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase PSKS yang dibina	86,43 %	841.683.733	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase PSKS yang dibina	86,43 %	841.683.733	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan KabKota	25 Orang	3.603.603	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan KabKota	25 Orang	3.603.603	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas TKSK Kewenangan KabKota	12 Orang	38.391.200	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas TKSK Kewenangan KabKota	12 Orang	38.391.200	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Lembaga	799.688.930	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Lembaga	799.688.930	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Loteng	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	78,12 %	503.913.107	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Loteng	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	78,12 %	503.913.107	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Loteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	1.250 Orang	381.130.488	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Loteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	1.250 Orang	381.130.488	

	Penyediaan Permakanan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	288 Orang	116.999.636	Penyediaan Permakanan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	288 Orang	116.999.636	
	Penyediaan Sandang	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	46 Orang	7.260.590	Penyediaan Sandang	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	46 Orang	7.260.590	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang	46.880.947	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang	46.880.947	
	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gepeng dan masyarakat	Kab. Loteng	Jumlah peserta bimbingan social kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gepeng dan masyarakat Kewenangan Kab/Kota	35 Orang	199.999.715	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gepeng dan masyarakat	Kab. Loteng	Jumlah peserta bimbingan social kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gepeng dan masyarakat Kewenangan Kab/Kota	35 Orang	199.999.715	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	9.989.600	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	9.989.600	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Loteng	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yg mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	0,67%	122.782.619	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Loteng	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yg mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	0,67%	122.782.619	

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.550 Orang	12.786.045	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.550 Orang	12.786.045	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	123 Orang	70.000.425	Penyediaan Permakanan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	123 Orang	70.000.425	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	60 Dokumen	39.996.149	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	60 Dokumen	39.996.149	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Loteng	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	730 orang	1.814.050.437	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Loteng	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	730 orang	2.134.970.837	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Fakir Miskin Yang difasilitasi data dan yang mendapatkan bantuan sosial	190.000 KPM	1.814.050.437	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Fakir Miskin Yang difasilitasi data dan yang mendapatkan bantuan sosial	190.000 KPM	2.134.970.837	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	190.000 KPM	626.170.837	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	190.000 KPM	626.170.837	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bansos Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	190.000 KPM	1.108.800.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Loteng	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bansos Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	190.000 KPM	1.108.800.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewangan Kab/Kota	35	79.079.600	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Loteng	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewangan Kab/Kota	20 Kelompok/ 200 orang	400.000.000	Pagu Sub Keg. ini hanya utk operasional BPNT dan belum ada utk pengembangan Ekonomi orang miskin berupa KUBE/UEP

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Loteng	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 %	176.128.420	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Loteng	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 %	176.128.420	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	100 %	139.992.316	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	100 %	139.992.316	
	Penyediaan Makanan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	139.992.316	Penyediaan Makanan	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	139.992.316	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Ko	Kab. Loteng	Persentase Tenaga yang memenuhi Standar Kompetensi	100 %	36.136.104	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Ko	Kab. Loteng	Persentase Tenaga yang memenuhi Standar Kompetensi	100 %	36.136.104	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	36.136.104	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Loteng	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	36.136.104	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Loteng	Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola	1 TMPNK	159.369.725	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Loteng	Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola	1 TMPNK	159.369.725	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang Layak	100%	159.369.725	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang Layak	100%	159.369.725	
	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional Kab/kota	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	149.234.813	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional Kab/kota	Kab. Loteng	Jumlah Dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	149.234.813	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	17 Makam	10.134.912.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Loteng	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	17 Makam	10.134.912.	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2026 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2025 adalah sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa	Kecamatan			
1.	Penyediaan Alat Bantu : Pemberian alat bantu kursi roda bagi kelompok disabilitas terlantar	Mong Desa Kuta	Pujut	Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu	2 unit	Pengusul : Sugiarto
2.	Penyediaan Alat Bantu : Pemberian Alat bantu tongkat bagi kelompok disabilitas terlantar	SEPANG DESA TERUWAI	PUJUT Kab. Lombok Tengah	Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu	1 Unit	Pengusul : Sugiarto
3.	Pemberdayaan Bagi WRSE		Kecamatan Jonggat dan Pringgarata, Kab. Lombok Tengah	Terpenuhinya orang yang mendapatkan bantuan pemmberdayaan	1 Paket	Pengusul : Muhalip
4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan KUBe (Kelompok Usaha Bersama)		Batukliang	Terpenuhinya orang yg mendapatkan bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat.kewenangan kab/kota	5 Paket	Pengusul : KI AGUS AZHAR, S.H.
5.	Penyediaan makanan bagi kelompok Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Desa lendang tampel, Kab. Lombok Tengah	Batukliang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket	Pengusul : BAIQ FATMAH
6.	Penyediaan makanan bagi kelompok Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan		Praya dan Praya Tengah	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket	Pengusul : H. AHMAD SUPLI, SH

7.	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Pemberdayaan (Kelompok Bersama)	Bantuan Ekonomi KUBe Usaha	Penggerak	Jonggat	Terpenuhinya orang yg mendapatkan bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat.kewenangan kab/kota	2 Paket	Pengusul : SAIFUL MUSLIM, S.H..

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
 - e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
 - f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:
- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam

Program Prioritas Daerah Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah ialah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

- a. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- e. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2025 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari

penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025.

Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Tahun 2025 sesuai dengan tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	1,30%	1,39%	1,49%
		Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	94,25%	95%	100%
			Persentase Penanganan Korban Bencana	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota

3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2026 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Ada 7 Program, 16 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 10.354.830.000,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Lombok Tengah

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	1.06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					10.354.830.000					10.903.000.000		
1	1.06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.870.800.000					4.993.000.000		
1	06	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					757.800.000					791.000.000		
06	01	2,01	00 01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	3 Dokumen	100%	28.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	29.000.000
06	01	2,01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	1 Dokumen	100%	5.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	6.000.000
06	01	2,01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	1 Dokumen	100%	3.800.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	4.000.000
06	01	2,01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	1 Dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	06	01	2,01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	1 Dokumen	100%	2.500.000.	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	3.000.000
1	06	01	2,01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	1 Dokumen	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	14.000.000
1	06	01	2,01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	1 Laporan	100%	12.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	14.000.000
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	2 Data	100%	677.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	700.000.000
1	06	01	2,01	00 08	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Berita Acara Hasi Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	1 Berita Acara	100%	17.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	18.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.334.000.000				3.388.000.000	
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	Praya	BB Predikat	23 Orang	100 %	3.250.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	3.300.000.000
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan hasil Keuangan OPD	Praya	BB Predikat	1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	6.000.000
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran Tahun SKPD	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan hasil Keuangan OPD	Praya	BB Predikat	12 Laporan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	16.000.000
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								32.000.000				33.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase IKU OPD yang tercapai	Praya	BB Predikat	25 Orang	100 %	32.000.000			Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	33.000.000
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								329.000.000					333.000.000
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Praya	BB Predikat	43 Paket	100 %	255.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	255.000.000
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Praya	BB Predikat	23 Paket	100 %	17.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	19.000.000
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah	BB Predikat	40 Laporan	100 %	52.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	53.000.000
1	06	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Praya	BB Predikat	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	6.000.000
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								79.000.000					100.000.000
1	06	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Praya	BB Predikat	3 Unit	3 Unit	79.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	100.000.000
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								158.000.000					160.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	06	01	2,08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Layanan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Praya	BB Predikat	12 Laporan	12 Bulan	74.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	75.000.000	
1	06	01	2,08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan penyediaan jasa PeLayanan Umum Kantor yang disediakan	Layanan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Praya	BB Predikat	12 Laporan	12 Bulan	84.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	85.000.000	
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							213.000.000						221.000.000	
1	06	01	2,09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	Praya	BB Predikat	24 Unit	90 %	158.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	160.000.000	
1	06	01	2,09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	Praya	BB Predikat	9 Unit	90 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	6.000.000	
1	06	01	2,09	00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	Praya	BB Predikat	1 Unit	90 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	55.000.000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							1.756.000.000						1.768.000.000	
1	06	02	2,02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							7.000.000							8.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	02	2,02	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Lembaga yang tersosialisasi UGB?PUB	Praya	99,95 %	5 Dokumen	100 %	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PSKS yang dibina	100 %	8.000.000
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								1.749.000.000				1.760.000.000	
1	06	02	2,03	00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Dibina	Praya	99,95 %	25 Lembaga	99,95 %	1.695.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PSKS yang dibina	100 %	1.700.000.000
1	06	02	2,03	00 14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas TKSK Kewenangan KabKota	Persentase PSKS yang Dibina	Praya	99,95 %	62 Orang	99,95 %	54.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PSKS yang dibina	100 %	60.000.000
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								22.530.000				25.000.000	
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								22.530.000				25.000.000	
1	06	03	2,01	00 03	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Dalam dan Luar Daerah	100%	10 Orang	100%	22.530.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1.050.000.000			1.119.000.000		
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								800.000.000			838.000.000		
1	06	04	2,01	00 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan,	83,68 %	.279 Orang	560 Orang	220.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	225.000,000
1	06	04	2,01	00 02	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah,	83,68 %	36 Orang	560 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	35.000,000
1	06	04	2,01	00 03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah,	83,68 %	22 Orang	560 Orang	90.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	95.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2,01	00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah	83,68 %	75 Orang	560 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	100 %	210.000.000
1	06	04	2,01	00 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah	83,68 %	80 Orang	560 Orang	153.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	100 %	155.000.000
1	06	04	2,01	00 14	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah	83,68 %	50 Orang	560 Orang	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya	100 %	8.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2,01	0015	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Kab. Lombok Tengah	83,68 %	18 Orang	560 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	110.000.000
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							250.000.000				281.000.000		
1	06	04	2,02	0003	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yg mendapatkan layanan kebutuhan dasar	Kab. Lombok Tengah,	83,68 %	123 Orang	245 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	83,68 %	110.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yg mendapatkan layanan kebutuhan dasar	Kab. Lombok Tengah,	83,68 %	12 Orang	245 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	11.000.000
1	06	04	2,02	00 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yg mendapatkan layanan kebutuhan dasar	Kab. Lombok Tengah	83,68 %	60 Dokumen	245 Orang	40.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	50.000.000
1	06	04	2,02	00 17	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Terpenuhinya PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yg mendapatkan layanan kebutuhan dasar	Kab. Lombok Tengah	83,68 %	50	245 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	110.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							2.050.000.000						2.350.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								2.050.000.000			2.350.000.000		
1	06	05	2,02	00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewangan Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	830 orang	200 Orang	1 Data	290.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	850 orang	350.000.000
1	06	05	2,02	00 06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bansos Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah,	830 orang	63.584 KPM	1 Data	1.110.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	850 orang	1.300.000.000
1	06	05	2,02	00 08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	<i>Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan</i>	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah,	830 orang	128.250 KPM	1 Data	650.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	850 orang	700.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								397.500.000			419.000.000		
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								336.000.000			355.000.000		
1	06	06	2,01	00 01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100 %	500 Orang	100 %	205.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhannya	100 %	210.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2,01	00 02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100%	100 orang	100%	25.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100%	30.000.000
1	06	06	2,01	00 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100%	30 Orang	100%	16.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100%	20.000.000
1	06	06	2,01	00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100%	90 Orang	100%	30.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100%	35.000.000
1	06	06	2,01	00 07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100%	10 Unit	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100%	60.000.000
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							61.500.000					64.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2,02	00 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100 %	1 KSB	100 %	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 %	30.000.000
1	06	06	2,02	00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100 %	40 Orang	100 %	26.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 %	27.000.000
1	06	06	2,02	00 03	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah,	100 %	40 Orang	100 %	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 %	7.000.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								208.000.000					229.000.000
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								208.000.000					229.000.000
1	06	07	2,01	00 01	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional Kab/kota	Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola	Jumlah Dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang Layak	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TMPNK	1 Dokumen	90 %	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola	1 TMPNK	200.000.000
1	06	07	2,01	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang Layak	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TMPNK	17 Makam	90 %	28.000.000.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola	1 TMPNK	29.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Capaian Program	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
TOTAL															10.903.000.000
									10.354.830.000						

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



H. MASNUN, S.Pd.M.Pd.
NIP.19681231 199302 1 013